

Tabel IV.9

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Jadwal Program Prioritas
			Target	Rp			
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing							
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	67,69%	2.270.669.787.645	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1	TW 4
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48%				
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%				
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87%				
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49%				
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%				
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79%				
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94%				
		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34%				
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	17.576.846.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1	TW 4
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 rasio	176.814.368.000	Dinas Kesehatan	PP-2	TW 4
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	65%	3.443.647.800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PP-1	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							

5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64%	21.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-1	TW 4
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 Orang	4.906.959.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PP-1	TW 4
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas							
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1%	55.635.043.182	Dinas Kehutanan	PP-3	TW 4
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47%				
		Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun				
		Produksi hasil hutan bukan kayu	850 ton				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	20 UKM	1.347.190.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3	TW 4
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	5%	6.998.165.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	1.570.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	5,20%	9.520.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30,00%	10.673.000.000	Dinas Pariwisata	PP-3	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	2.750.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3	TW 4
		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	100%				

14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat	2.600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3	TW 4
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2.700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	50702 Ha	600.000.000	Dinas Perkebunan	PP-3	TW 4
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	25,36%	20.852.056.400	Dinas Perkebunan	PP-3	TW 4
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	11,15%	5.026.179.200	Dinas Perkebunan	PP-3	TW 4
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	26,50%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	97.6 Skor	3.909.764.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3	TW 4
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	86.3 Skor				
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	0%	4.200.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3	TW 4
		Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	1 Kecamatan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan	41,39%	3.800.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3	TW 4
		Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	34%				
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	35,50%	24.519.950.500	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3	TW 4
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	39,29%				
23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	77%	2.849.500.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							

24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,54 Skor	1.300.734.098	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3	TW 4
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	96,21 Skor	37.304.182.274	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3	TW 4
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 Skor				
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	91,79 Skor	10.089.966.422	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3	TW 4
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95,11 Skor				
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98,68 Skor	1.780.474.210			
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	4.023.794.539	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	190000 Ton	30.167.174.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3	TW 4
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	200000 Ton	10.937.395.361	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3	TW 4
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	4.164.364.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3	TW 4
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12936 Orang	21.777.911.886	Dinas Sosial	PP-5	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25,00%	8.104.662.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PP-5	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							

33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	178.238.293.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-5	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	16%	1.245.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP-5	TW 4
		Persentase kinerja realisasi pupuk	85%				TW 4
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP	82%	14.192.000.000	Dinas Perhubungan	PP-4	TW 4
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	0,006 Angka				TW 4
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	175 Kejadian				TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemandapan jalan provinsi	82,09%	1.169.877.261.683	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4	TW 4
		Penambahan Ruas Jalan Baru	1 ruas				TW 4
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 Ha	317.066.477.680	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4	TW 4
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 Ha				TW 4
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94 Lt/detik				TW 4
		Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km				TW 4
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang berfungsi baik	11,15%	43.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4	TW 4
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65%	165.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4	TW 4

40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64%	21.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4	TW 4
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	13.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	178.238.293.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4	TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
42	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	92,97%	45.162.580.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-4	TW 4
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100,00%				TW 4
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250 kWp				TW 4
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	34,10%				TW 4
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup							
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤5 (Tercemar Ringan) Indeks	9.202.247.305	Dinas Lingkungan Hidup	PP-6	TW 4
		Indeks Standar Pencemar Udara	48 (baik) Indeks				TW 4
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							
44	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1%	55.635.043.182	Dinas Kehutanan	PP-6	TW 4
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47%				TW 4
		Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun				TW 4
		Produksi hasil hutan bukan kayu	850 ton				TW 4

45	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	610540.98 Hektar	5.826.687.000	Dinas Kehutanan	PP-6	TW 4
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 Ha	3.728.275.000	Dinas Kehutanan	PP-6	TW 4
47	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 Ha	35.924.564.841	Dinas Kehutanan	PP-6	TW 4
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok				TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100%	6.915.440.100	Dinas Perkebunan	PP-6	TW 4
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
49	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN	34,10%	45.162.580.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-6	TW 4
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250,00 kWp				TW 4
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100%				TW 4
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	92,97%				TW 4
50	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	243.246,516 Ton CO2e/Tahun	49.004.873.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-6	TW 4
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	43,76%				TW 4
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	33,56%				TW 4
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi							
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK							
KEPEGAWAIAN							
51	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 indeks	25.023.390.800	Badan Kepegawaian Daerah	PP-7	TW 4
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							

52	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	26.500.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PP-7	TW 4
SEKRETARIAT DAERAH							
53	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1 PD	5.400.000.000	Biro Organisasi	PP-7	TW 4
		Indeks Kelembagaan	72 Indeks				TW 4
		Indeks Kematangan Organisasi	44 Indeks				TW 4
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	86%				TW 4
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40%				TW 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
54	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80%	23.600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	PP-7	TW 4
INSPEKTORAT DAERAH							
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	100%	16.870.000.000	Inspektorat	PP-7	TW 4